PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1

B. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan	Pelepasan varietas tanaman perke-bunan	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi			

I.B.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan			

I.B.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sertifikasi benih tanaman perkebunan		pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau			

I.B.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman						daya yang baik (GAP)			
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			biji-bijian penghasil minyak makan lainnya						mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem		Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	01118	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan	Pelepasan varietas tanaman perkebunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya	Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun	3 Hari		-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana,		4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara		2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
3	01137	Pertanian Bit, Gula dan	Kegiatan pembibitan dan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan	Pelepasan	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tanaman Pemanis Bukan Tebu	pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	- Menengah					lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	varietas tanaman perkebunan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca-	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis								Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) cek		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia,	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta		3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang		sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusaha-kan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan		tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
4	01140	Perke-bunan Tebu	Kegiatan pembibitan, dan pembenihan tebu	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan	Pelepas-an varietas tanaman perke-bunan	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sertifikasi benih tanaman perkebunan		pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanaman, pemelihara-an dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis			Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki		mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala		Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas		1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun		pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampai-kan Laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
5	01150	Perke-bunan Temba-kau	Pembibitan dan pembenihan tanaman tembakau	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme	- Pele-pasan Varie-tas Tana-man Per-kebun-an	Seluruh	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen	15 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampai-kan laporan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tembakau. Termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan	Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	daya yang baik (GAP)			
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perkebunan-nya				2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendali-an organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem		2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan		dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangun-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggup-an memfasilita-si pembangun-an kebun masyarakat sekitar		an kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggup-an melaksana-kan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		dan keragaman sumber daya 70enetic serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanak-an tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
6	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf,	Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).			
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya				memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan		baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat		koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan		tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampai-kan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
7	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman pakan ternak (Produksi Benih Tanaman penutup Tanah)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standa	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sertifikasi benih tanaman perkebunan		pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi daya tanaman penutup tanah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis			Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
			Budi daya tanaman pakan ternak	Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	- Sertifi-kasi benih tana-man pakan ternak (Sertifi-kasi Benih Varie-	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
				Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi *self declare* terhadap standar		Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak 2. Melakukan usaha Budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik	tas Lokal) - Sertifikasi benih tanaman pakan ternak (Sertifikasi Benih Bina) - Sertifikasi benih tanaman pakan ternak (Pereda		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat standar	-	Otomatis	1. Memelihara sumber benih. 2. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									standar mutu. 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 4. Menerapkan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 5. Menerapkan teknologi pembukaan	-ran Benih Tanaman Pakan Ternak) - Pelepasan varietas tanaman pakan ternak (Pelepasan Varietas)	kota dalam satu provinsi	
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.			
8	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	Kegiatan perbenihan tanaman semusim lainnya. Meliputi pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	- Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan	15 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
							-	Otomatis				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca-panen. Meliputi pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain	Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat standar			1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.110

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.113

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha		Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusaha-kan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
9	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan peraturan perbenihan 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan	- Pendaftaran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan subtropis						instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- horti-kultura - Pele-pasan Varie-tas Tana-man Perke-bunan	Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan		Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.119

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat pernyataan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang		kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan perbenihan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.120

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan penyiapan/ pelaksana-an, penanam-an, pemelihara-an, pemanenan dan pasca-panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP 2. Membuat catatan kegiatan usaha	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun	7 Hari	1. Melakukan transfer teknologi.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya				termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		2. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L. 4. Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah			
											Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		memiliki sertifikat GAP.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.125

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah tropis dan subtropis (Produksi Benih Kurma)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari			Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan penyiapan/ pelaksanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah-buahan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga								Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia,	3 Hari	1. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan sejenisnya (Budi Daya Kurma)				sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta		berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 5. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala		lintas provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.132

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha		1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan		usaha diberikan 7. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
10	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.137

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.138

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.139

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	-	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.142

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Dalam satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.144

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, Kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya	- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu	3 Hari	1. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan teknik budi		Dalam satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		daya yang baik dan benar 4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 5. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan		dengan peraturan perundang-undangan 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat		status hak atas tanah 8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sekitar Perkebunan		pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
11	01261	Perke-bunan Kelapa	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah kelapa	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.157

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan Budi daya Tanaman Kelapa yang baik sesuai GAP		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun	3 Hari	1. Menjaga kelestarian fungsi		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan		Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi		tumbuhan (OPT) 5. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 6. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 7. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		dengan kewenangan-nya 8. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 9. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.			
12	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit	- Mikro, - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu	- Pelepasan varietas tanaman perkebunan - Surat Persetujuan Penya-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau	luran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk penelitian/ riset - Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur	produsen pembesaran - Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk perusahaan kelapa sawit - Surat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan	Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk Pekebun (perorangan / kelompok) - Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	Sawit (SP2BKS) untuk pengecambahan di seed processing unit		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Lahan Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana kerja pembangunan kebun	5 Hari	1. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 2. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta		Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi		1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Melaksana-kan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		perundang-undangan 7. Menerapkan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 8. Menerapkan teknik Budi daya yang baik dan benar 9. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.			
13	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampai-kan laporan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.186

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu	3 Hari	1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta		Usaha berlokasi di Kabupaten/kota	Bupati/Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menerapkan sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan		pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 5. Menerapkan teknik Budi daya yang baik dan benar. 6. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 7. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 8. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sekitar Perkebunan		dan masyarakat sekitar. 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.			
14	01270	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman untuk bahan minuman (Produksi benih teh, kopi, kakao)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.191

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.196

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.198

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kopi, mate dan kakao (Budi daya kopi dan kakao)								lintas provinsi	
				- Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan		tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua)		lintas provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja		tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,		masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampai-kan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana kerja pembangunan kebun	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha		Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.206

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi		6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
15	01281	Perkebunan Lada	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.212

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.215

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.216

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai--an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an dan pemanenan lada atau merica (piper spp)	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.219

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi		1. Rencana kerja pembangunan	5 Hari	1. Menerapkan teknologi		Usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi		Kabupaten/ kota	
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi		setelah pemberian status hak atas tanah 6. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.223

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksana-kan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
16	01282	Perkebunan Cengkeh	Kegiatan pembibitan dan pembenih-	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa	Pelepasan Varietas Tanaman	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an tanaman cengkeh	- Mene-ngah					bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai	Perke-bunan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an dan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP).	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemanenan cengkeh								Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP).		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.236

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya	5 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana,		3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000		Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara		(cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusaha-kan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi		Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan		pembangun-an kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksana-kan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
17	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik	Kegiatan pembibitan dan pembenih-	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	i. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa	Pelepasan Varietas Tanaman	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		/ Penyegar	an tanaman aromatik/ penyegar	- Menengah					bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	Perkebunan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.243

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.245

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian		Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.247

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemeliharaan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang								Kabupaten/ Kota	
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat standar	-	Otomatis	1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.252

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan Tumbuhan (OPT) dan		Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana,	3 Hari			Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran		perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 5. Penerapan teknik Budi		lintas Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup		daya yang baik dan benar. 6. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara Lestari. 7. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan		kewenangan-nya. 8. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		masyarakat sekitar. 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.			
18	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	Kegiatan Perbenihan Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	Pendaftaran varietas tanaman	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.257

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			mencakup kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman obat atau biofarmaka rimpang termasuk pula tanaman bahan insektisida						instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.258

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan fungisida dan yang sejenis, seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur,	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Hari pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih. 2. Surat pernyataan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. (Benih Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang)				memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 3. Surat pernyataan menguasai tempat Usaha Produksi.		instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan.		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang.				Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman obat atau biofarmaka	- Mikro, - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya	- Pelep-asan Varie-tas Tana-man Per-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			rimpang (Produksi Benih Ginseng)						alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan	kebun-an		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.262

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.264

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.265

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.268

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tanaman obat atau biofarmaka rimpang (Budi daya Ginseng)								Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 2. Menyampai-kan peta		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.271

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial		lintas Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk	5 Hari			Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan		dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 5. Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar. 6. Penerapan teknologi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.273

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja		pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara Lestari 7. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya . 8. Melakukan Fasilitasi pembanguna			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,		n kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		setelah pemberian status hak atas tanah			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang	- Mikro - Kecil	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) 2. Memenuhi standar usaha budi daya hortikultura tanaman obat atau	Pendaftaran varietas tanaman hortikultura	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.276

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas,						biofarmaka rimpang		Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat pernyataan memiliki	7 Hari	Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lempuyang, dlingo dan sejenisnya (Budi daya Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang)				sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		dengan kewenangannya		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki	7 Hari	Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 2. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih. 3. Surat Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau		*Corporate Social Responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.279

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 4. Surat pernyataan menguasai tempat Usaha Produksi.					
19	01286	Pertanian Tanaman Obat atau	Perbenihan Hortikultura Tanaman Obat atau	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik	Pendaftaran varietas tanaman	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Biofarmaka Non Rimpang	Biofarmaka Non Rimpang mencakup kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kapulaga,	- Menengah					kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menerapkan peraturan perbenihan 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi) 4. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP	hortikultura	Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			orang-aring, iles-iles, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya)	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan menguasai tempat Usaha Produksi 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi benih atau peredaran benih 4. Surat pernyataan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang				Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	- Pengeluaran dan pemasukan benih tanaman	Seluruh	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen	15 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (Produksi Benih Kina, Adas Pinang dan Gambir)				benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber	perkebuna - Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.284

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.285

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan sesuai standar 11. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan Menerapkan teknologi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai--an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			rimpang termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kapulaga, orang-aring, iles-iles, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan								lintas provinsi	
				Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan	7 Hari	1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Penerapan sistem pengendalian		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sejenisnya(Budi daya tanaman obat atau biofarmaka non rimpang)	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran	7 Hari	organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat: 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas		peraturan perundang-undangan. 5. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan Fasilitasi pembangun-an kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan		sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.		tumbuhan (OPT) 9. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan kewenangan-nya.			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanaman, pemelihara-an, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoamn budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(Budi daya Kina, Adas Pinang dan Gambir)	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme	3 Hari	1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		3 Hari			Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan		5. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.297

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Surat pernyataan Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat		7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sekitar perkebunan		9. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya.			
20	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik /Penye-gar dan Obat Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembeniha nnya (Produksi benih kemiri, panili, kayu manis, pala)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai	Pelepasan varietas tanaman perke-bunan	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.300

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.302

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.305

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.308

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala (Budi daya kemiri, panili, kayu manis, pala)	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Menjaga kelestarian		Usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan		Kabupaten/ kota	
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.310

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan	5 Hari	skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.311

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		peraturan perundang-undangan 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan		Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian		perundang-undangan 4. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 5. Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar 6. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari		Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan Kesanggupan		7. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 8. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 9. Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 10. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.315

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Kegiatan Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Karet Dan Penghasil Getah Lainnya	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.318

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarka			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.321

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan budi daya tanaman karet dan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penghasil getah lainnya						daya yang baik (GAP)		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun	5 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana,		2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file		Kabupaten/ Kota	
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan		elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi		dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya.			
22	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Kegiatan pembenihan dan pembibitan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.330

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.331

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.332

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan budi daya tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.340

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian		Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan Kesanggupan		6. Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
23	12091	Industri Pengolahan dan Pengeringan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan tanggungjawab sosial dan	Sertifikat Laik Operasi Pengusa-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tembakau							lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	haan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Terintegrasi dengan kebun tembakau	5 Hari	1. Penanganan limbah sesuai ketentuan	-	Usaha yang areal dan/atau sumber	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang 3. Memiliki Dokumen Surat Keterangan Lahan atau lokasi usaha tidak dalam keadaan usaha dari Dinas teknis 4. Memiliki dokumen kesepakatan antara Kelompok		pasokan berada di satu Kabupaten/ Kota	-
											Usaha yang areal dan/atau sumber pasokan berada di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.346

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Tani / Gapoktan dengan pemilik lahan terhadap lahan atau lokasi yang digunakan sebagai prasarana usaha atau Surat Hibah dari pemilik lahan kepada Kelompok Tani/Gapok-tan 5. Memiliki atau menguasai alat yang memenuhi SNI termasuk suku cadangnya		Usaha yang areal dan/atau sumber pasokan berada di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(Bukti kepemilikan/ penguasaan alat) 6. Untuk Kelompok Tani /Gapoktan wajib terdaftar di Simluhtan 7. Mengintegra-sikan usaha pengolahan dengan kebun 8. Pernyataan Kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 9. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidupdan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.348

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	22121	Industri Pengasapan Karet	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Mengelola lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan, baik AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	- Sertifikat TKDN - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Per-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Terintegrasi dengan kebun karet	5 Hari	1. Penanganan limbah sesuai ketentuan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.351

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang 3. Memiliki Dokumen Surat Keterangan Lahan atau lokasi usaha tidak dalam keadaan usaha dari Dinas teknis 4. Memiliki dokumen kesepakatan antara Kelompok Tani / Gapoktan dengan pemilik lahan		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.352

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terhadap lahan atau lokasi yang digunakan sebagai prasarana usaha atau Surat Hibah dari pemilik lahan kepada Kelompok Tani/Gapok-tan 5. Memiliki atau menguasai alat yang memenuhi SNI termasuk suku cadangnya (Bukti kepemilikan/ penguasaan alat)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.353

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Untuk Kelompok Tani /Gapoktan wajib terdaftar di Simluhtan 7. Mengintegrasi kan usaha pengolahan dengan kebun 8. Pernyataan Kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 9. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan kewenangan-nya			
25	01630	Jasa Pasca-panen	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (*good handling practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembang an usaha kepada	- SPPB PSAT - PSAT-PD - PSAT-PDUK - Izin Rumah Penge-masan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (good handling practices) 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.356

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 2. Surat pernyataan terkait	7 Hari	1. Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (*good handling practices*)		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							informasi status kepemilikan dan kapasitas gudang 3. Bukti penguasaan alat 4. Surat keterangan/ sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan 5. Dokumen rencana kerja		2. Menggunakan alat yang memenuhi SNI/PTM 3. Menguasai gudang 4. Memiliki operator alat yang terlatih, dan teknisi alat 5. Memiliki Ketersediaan alat untuk mobilisasi 6. Memiliki Ketersediaan *sparepart*		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
26	01111	Pertanian Jagung	Kelompok ini	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapka cara budi daya	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika	- Kecil					tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Kabupaten/ kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) dan 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.360

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, dan c. laporan pemasaran. Laporan disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.361

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampai-kan laporan perkembang an usaha meliputi:		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

I.B.362

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laporan penggunaan bahan baku, laporan proses produksi dan laporan pemasaran. Laporan disampai-kan setiap 1 tahun sekali kepada		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.363

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.		Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.364

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman jagung						dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.366

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian.			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Surat Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan		3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT 4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan keterampilan di bidang perbenihan					
27	01112	Pertanian Gandum	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/ cantel,								Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gandum (wheat/ oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya						2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran. Laporan disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.371

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 3. Menyampai-kan laporan perkembanga n usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-ran. yang disampai-kan minimal		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 2. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 3. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			serealia gandum seperti sorgum/ cantel, gandum (wheat/ oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jewawut (millet)						atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Surat Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai		3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT 4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan					
28	01113	Pertanian Kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija)								Kota dalam satu Provinsi	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran. yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.380

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. laporan pemasaran. yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tenaga kerja warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija)						teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good*	- Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									agriculture practices) 7. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk		(*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT 4. Memiliki keterangan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan		kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Surat pernyataan menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*)					
29	01114	Pertanian Kacang Tanah	Kelompok ini mencakup usaha pertanian	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good*	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang						*agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good*		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tanah (kacang palawija)						*agriculture practices*) 2. Menyampaikan Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaranyang disampaikan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.391

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha budi daya		perkembang-an usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-ranyang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.392

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.393

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan tanaman kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan , dan juga pemanenan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija						4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*) 7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.396

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkem-bangan usaha kepada		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)		Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
30	01115	Pertanian Kacang Hijau	Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau						yang baik (*good agriculture practices*)		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.400

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(kacang palawija)						2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran. yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian		Kota dalam satu Provinsi	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.401

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. laporan pemasa-ran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija)						produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.405

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (good agriculture practices) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.406

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan		benih bukan daerah endemis OPT 4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkem-bangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.407

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)					
31	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Kelompok Ini Mencakup Usaha Pertanian	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good*	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya	Serealia Lainnya, Aneka Kacang, Dan Biji Bijian Pengahasil Minyak Lainnya Mulai Dari Kegiatan Pengolahan Lahan, Penanam-an, Pemelihara-an, Pemanenan dan Pascapanen Jika Menjadi Satu						*agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembangan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kesatuan Kegiatan Tanaman Serealia Lainnya Bukan Padi, Jagung Dan Gandum, Tanamanan Aneka Kacang Lainnya Dan Pertanian Lainnya Yang Belum Diklasifikasikan Pada Kelompok 01111 s.d. 01118						usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.410

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampai-kan Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. laporan pemasa-ran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan serealia lainnya, aneka kacang, dan biji bijian penghasil minyak lainnya mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemelihara-	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanamanan aneka kacang lainnya dan pertanian lainnya						produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.414

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 sd 01118. Termasuk						7. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.415

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman serealia dan biji bijian penghasil minyak lainnya	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (good agriculture practices) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membukti-kan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.416

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
32	01121		Kelompok ini	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.418

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pertanian Padi Hibrida	mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan	- Kecil					tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas Gabah Kering Panen (GKP)	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.420

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-ran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian .		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.421

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi:		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.422

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-ran yang disampaikan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.424

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis (berupa informasi spasial) 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sampai dengan dihasilkan gabah kering yang memenuhi kriteria standar mutu benih						pengawasan dan sertifikasi benih 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 7. Menyampai-kan laporan perkembangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha kepada Menteri Pertanian			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.427

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkem-bangan usaha kepada		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)		Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
33	01122	Pertanian Padi Inbrida	Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.429

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanam-an, pemelihara-an, dan						yang baik (*good agriculture practices*)		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas Gabah Kering Panen (GKP).	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampai-kan laporan perkembangan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.432

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha budi daya		usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.433

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan pertanian inbrida (bukan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1 Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis	- Pelepasan varietas tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan gabah kering yang						institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai	- Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			memenuhi kriteria standar mutu benih						pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6 Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 7 Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.436

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.437

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkembang an usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
34	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Kelompok ini mencakup usaha	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika						yang baik (*good agriculture practices*)			
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. laporan pemasaran yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*).		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.442

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
.							2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya		2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih	- Pelepasan varietas	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija seperti ubi kayu, ubi						bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai	tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.445

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles iles, porang dan umbi umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenih-an aneka						pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.446

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			umbi palawija	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (good agriculture practices) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.447

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
35	01611	Jasa Pengolah-an Lahan	Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan budi daya tanaman	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering	- Menengah					pangan yang baik (GAP) 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan *GAP*	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik (GAP) 2. Menyampaikan laporan perkembangan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.450

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Bukti penguasaan alat 3. Surat keterangan/ sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan 4. Dokumen rencana kerja		usaha kepada Menteri Pertanian		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
36	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih	Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan aplikasi	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.451

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dan Pengendalian Hama dan Gulma	lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak						pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama, penyakit dan gulma 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan sarana prasarana yang meliputi alat dan mesin serta bahan pemupukan/	7 Hari	1. Memiliki Bukti penguasaan sarana prasarana 2. Memiliki Sertifikat pelatihan atau kompetensi		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembibitan/ pengendalian OPT yang memenuhi SNI 2. Sertifikat kompetensi dalam aplikasi pemupukan/ penanaman bibit/benih, atau pengendalian hama dan gulma 3. Dokumen rencana kerja		dalam melakukan aplikasi pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama, penyakit dan gulma 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP): 4. Menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SNI/Persyarat-		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an Teknis Minimal 5. Menguasai gudang, alat untuk mobilisasi 6. Menggunakan operator alat yang kompeten 7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			
37	01613	Jasa Pema-nenan	Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.454

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan pengumpulan hasil panen di lokasi yang disepakati atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak						2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.455

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan alat 2. Pernyataan akan menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik	7 Hari	1. Memiliki Bukti penguasaan sarana prasarana 2. Memiliki Sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan pemanenan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.456

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki operator yang kompeten 4. Dokumen rencana kerja		3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) 4. Menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SNI/Persyarat-		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.457

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an Teknis Minimal 5. Menguasai alat untuk mobilisasi 6. Menggunakan operator alat yang kompeten 7. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	Kelompok ini mencakup usaha penyemprotan dan penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan standar, operasional, dan prosedur penyemprotan dan penyerbukan 2. Memiliki izin operasional dari instansi terkait 3. Memiliki operator yang kompeten 4. Menyampaikan laporan	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.459

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan alat 2. Surat pernyataan memiliki operator yang kompeten 3. Dokumen rencana kerja	7 Hari	1. Menerapkan standar, operasional, dan prosedur penyemprotan dan penyerbukan 2. Memiliki izin operasional dari instansi terkait		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki operator yang kompeten 4. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
39	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan penggunaan sarana penunjang sesuai dengan GAP/GHP	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/ penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemelihara-						2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan alat 2. Surat pernyataan kelayakan	7 Hari	1. Menyediakan sarana penunjang pertanian yang layak		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasuk-kan dalam 77305.				sarana penunjang pertanian yang disediakan 3. Surat keterangan/ sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan 4. Dokumen rencana kerja		2. Menerapkan penggunaan sarana penunjang sesuai dengan GAP/GHP. 3. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.463

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40	01640	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengem-bang-biakan	Mencakup semua kegiatan pasca-panen yang ditujukan untuk meningkat-kan perkem-bangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Menerapkan *Good Handling Practices* (GHP) untuk benih. 2. Kelayakan Teknis sebagai produsen dari instansi yang berwenang 3. Menyampai-kan laporan perkem-bangan usaha kepada	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang dan juga menjaga						Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan akan menerapkan *Good Handling Practices* (GHP) untuk benih	7 Hari	1. Menerapkan GHP untuk benih. 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpan-an benih. Kegiatan ini mencakup pengering-an, pembersih-an, sortasi, dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaa-an benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini				2. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen dari instansi yang berwenang 3. Bukti penguasaan alat				Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
41	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras yang akan dijual termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memperhatikan prinsip K3L 2. Menerapkan praktik higienis dan sanitasi 3. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian minimal satu	- Sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penggiling-an padi						bulan sekali terkait: a. Informasi sumber, volume dan harga pembelian bahan baku (GKP/GKG) per bulan b. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Beras Medium, dll), volume penjualan, wilayah pemasa-ran, dan harga jual per bulan dan	- Izin Edar PSAT Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Edar PSAT Pro-duksi Dalam Negeri - Regis-trasi PSAT Pro-duksi Dalam Negeri	Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.468

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Informasi stok gabah (GKP/GKG) dan/atau beras pada akhir bulan.	Usaha Kecil		
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi penerapan GHP/GMP 2. Memberikan laporan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri Pertanian minimal satu bulan sekali terkait: a. Jenis dan Kapasitas Sarana dan Prasarana serta teknologi yang digunakan b. Perkembangan Usaha serta kapasitas produksi c. Informasi sumber, volume dan harga pembelian,		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kadar air bahan baku (GKP, GKG dan PK) per bulan d. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Beras Medium, Beras Premium, Beras Pecah/Menir, dll), volume penjualan, wilayah pemasa-ran dan harga jual per bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. Informasi stok gabah (GKP/GKG), Stok PK dan/atau beras (Beras Medium/Beras Premium) pada akhir bulan.			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan *Good Handling Practices* (GHP)/ *Good Manufacturing Practices* (GMP)/ *Hazard Analysis*	7 Hari	1. Memenuhi penerapan *Good Handling Practices* (GHP)/ *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Hazard Analysis Critical*		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.472

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Critical Control Point (HACCP). 2. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana (*Receiving, Drying, Silo,* Husking, Milling, Packing, gudang), serta teknologi yang digunakan. 3. Rencana usaha dan kapasitas produksi 4. Surat pernyataan		*Control Point* (HACCP). 2. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian minimal satu bulan sekali terkait: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana terpakai (*Receiving, Drying, Silo, Husking,*		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.473

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber bahan baku		*Milling, Packing*, Gudang), serta teknologi yang digunakan b. Perkembangan usaha serta kapasitas produksi c. Informasi sumber, volume dan harga pembelian, dan kadar air			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.474

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku (GKP, GKG, dan PK) per bulan d. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Beras Medium, Beras Premium, Beras Pecah/Menir, dll), volume penjual-			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.475

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, wilayah pemasaran dan harga jual per bulan e. Informasi stok gabah (GKP/GKG), Stok PK dan atau beras (Beras Medium/ Beras Premium) pada akhir bulan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.476

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
42	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung termasuk semua bagian dari tanaman jagung	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memperhatikan prinsip K3L 2. Menerapkan praktik higienis dan sanitasi 3. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian yang benar dan mudah diakses	- Sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.477

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal satu bulan sekali terkait : a. Informasi sumber, volume, harga pembelian dan kadar air bahan	tumbu-an - Izin Edar PSAT Pro-duksi Dalam Negeri	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baku per bulan b. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (jagung pipilan kering pakan atau pangan), volume penjualan, wilayah pemasa-ran dan harga jual per bulan c. Informasi stok jagung pada akhir bulan	- Izin Edar PSAT Pro-duksi Dalam Negeri - Regis-trasi PSAT Pro-duksi Dalam Negeri Usaha Kecil	Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.479

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi penerapan GHP/GMP 2. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian yang benar dan mudah diakses minimal satu bulan sekali terkait : a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan b. Perkembang-an usaha		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta kapasitas produksi c. Informasi sumber, volume, harga pembelian dan kadar air bahan baku per bulan d. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Jagung pipilan kering pakan atau pangan), volume penjualan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									wilayah pemasaran dan harga jual per bulan e. Informasi stok jagung pada akhir bulan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan *Good Handling Practices* (GHP)/*Good Manufacturing Practices* (GMP)	7 Hari	1. Memenuhi persyaratan *Good Manufacturing Practices* (GMP). 2. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.482

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan. 3. Rencana usaha serta kapasitas produksi 4. Surat pernyataan sumber bahan baku		yang benar dan mudah diakses minimal satu bulan sekali terkait a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi yang diguna-kan b. Perkembangan usaha serta		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapasitas produksi c. Informasi sumber, volume, harga pembelian dan kadar air bahan baku per bulan d. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (jagung pipilan kering pakan atau		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pangan), volume penjualan, wilayah pemasaran dan harga jual per bulan e. Informasi stok jagung pada akhir bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
43	01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	-	Otomatis	1. Melakukan usaha perbenihan sesuai pedoman perbenihan tanaman pakan ternak yang baik. 2. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap	- Sertifikasi benih tanaman pakan ternak (Sertifikasi Benih Varietas Lokal)	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.486

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									standar kegiatan usaha perbenihan tanaman pakan ternak.	- Sertifikasi benih tanaman pakan ternak (Sertifikasi Benih Bina) - Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak (Peredaran Benih Tana-	Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										man Pakan Ternak) - Pelepas-an Varietas Tana-man Pakan Ternak (Pele-pasan Varietas		
44	01411	Pembibit-an dan Budi Daya Sapi Potong	Kegiatan pembibitan sapi potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan	Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.488

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik		
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara pembibitan ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja		Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru.		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan budi daya sapi potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.490

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik		
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembanguna		Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.491

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		n unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
45	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	Kegiatan pembibitan sapi perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.493

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembanguna n unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
			Budi daya Sapi Perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi	- Sertifi-kasi Cara Budi daya Ternak	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.494

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada	Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Registrasi Produk Hewan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru		pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
46	01413	Pembibit-an dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang baik		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.497

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
			Budi daya kerbau potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Sertifika-si Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.498

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
47	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan kewena-ngannya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewena-ngannya		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		wilayah lintas Provinsi	
			Budi Daya kerbau perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan	- Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veterriner - Registrasi Produk Hewan		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik . 2. Surat keterangan mengenai jenis	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.503

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.504

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
48	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Pembibitan Kuda dan Sejenisnya	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan		Lahan usaha berada di wilayah	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.505

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		Ternak Yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Kabupaten/ Kota	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.506

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi Daya Kuda dan Sejenisnya	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.507

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.508

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.509

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
49	01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara pembibitan/Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	- Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik - Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.510

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk	7 Hari	1. Menerapkan Cara pembibitan/ Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pemba-		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengembangan rumpun/galur baru		ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
50	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	Pembibitan domba potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
			Budi daya domba potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik		
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
51	01442	Pembibitan dan Budi	Pembibitan kambing potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan	Sertifikasi Cara	Lahan usaha yang berada di wilayah	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.516

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Daya Kambing Potong							Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Pembibitan Ternak Yang Baik	Kabupaten/ Kota	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan		Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas	Gubernur

SK No 120846 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.518

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi daya kambing potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik		Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai		Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.520

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan kewenangan-nya			
52	01443	Pembibit-an dan Budi Daya Kambing Perah	Pembibitan kambing perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.521

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.522

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru					
			Budi daya kambing perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	- Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.523

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan	- Registrasi Produk Hewan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/kota	Bupati/Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.524

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
53	01444	Pembibit-an dan Budi Daya Domba Perah	Pembibitan domba perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah yang berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.525

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.526

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
			Budi daya domba perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan	- Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.527

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya	Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan		
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau	7 Hari	1. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
54	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ Raw Wool	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik	- Sertifikasi Cara Pembibitan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan		2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Ternak Yang Baik - Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.530

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
55	01450	Peternakan Babi	Pembibitan babi	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara pembibitan Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.532

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi daya babi	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara Budi Daya Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.533

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
56	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.535

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak Yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
57	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi	- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Registrasi	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Produk Hewan - Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
58	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara pembibitan Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha Lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik. 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya.		Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha Lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.			
59	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik	- Sertifikasi Cara Budi	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persilang-annya							2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Daya Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Registrasi Produk Hewan	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.542

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.543

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60	01465	Pembibit-an dan Budi Daya Itik dan/atau bebek	Pembibitan Itik dan/ atau bebek	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara pembibitan Ternak yang baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.544

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan cara pembibitan Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pemba-ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Budi Daya Itik dan/ atau bebek	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner untuk budi daya skala Besar - Registrasi Produk Hewan, untuk budi daya	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja Pembangunan unit usaha		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	skala Besar	Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
61	01466	Pembibitan dan Budi Daya	Pembibitan burung puyuh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik	Sertifikasi Cara Pembibitan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Burung Puyuh							2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Ternak Yang Baik	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.549

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.550

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi daya burung puyuh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	_	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	- Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner untuk budi daya skala Besar - Registrasi	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi,		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.551

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan		produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja	Produk Hewan untuk budi daya skala Besar	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
62	01467	Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	_	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau Budi daya Ternak Yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi	- Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan dan Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
63	01468	Pembibitan Ayam Ras	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik	Sertifikasi Cara Pembibitan	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/kota	Bupati/Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.555

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ternak Yang Baik	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.556

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru		pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan			
64	01469	Pembibit-an dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan produksi dan distribusi	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya ternak yang Baik		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.559

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau		2. Menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan		Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
65	01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan produksi dan distribusi	- Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya Ternak yang Baik		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau		2. Menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan		Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
66	01492	Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan	- Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi,	
											Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
67	01493	Pembibit-an dan Budi Daya Lebah	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi	- Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik - Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Izin edar pa-	Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas,	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	ngan olahan - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (Pmr) Sarana Produksi Pangan olahan - Izin Penerapan Cara Produksi	Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.567

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan olahan yang Baik - Persetujuan pelaksanaan uji klinik pangan Olahan - Izin Pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat dan label		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										pangan olahan - Sertifikat pemenuhan komitmen ulang pangan olahan - Izin variasi mayor pangan olahan - Izin variasi nama dan/ atau alamat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										kantor importir Pangan olahan selama masih dalam satu provinsi - Izin variasi nama produsen pangan olahan - Sertifikat persetujuan variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										mayor pangan olahan wajib SNI - Sertifikat pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan - Sertifikat pemenuhan komitmen variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										minor pangan olahan - Izin edar pangan olahan dengan notifikasi - Sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI - Sertifikat pemenuhan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										komit-men pangan olahan		
68	01494	Pembibit-an dan Budi Daya Rusa	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik - Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.573

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertfikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan	Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
69	01495	Pembibit-an dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan kelinci	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.575

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Budi daya kelinci	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi,	Sertifika-si Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewena-ngannya	Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.578

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan		populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi		Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
70	01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi	- Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.580

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara pembibitan atau budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas provins	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan lokasi usaha peternakan		3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
71	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha rumah sarang walet	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan	7 Hari	1. Memenuhi cara pembibitan dan budi	- Sertifikasi Nomor Kontrol	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.582

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			cara pembibitan dan budi daya ternak yang baik 2. Surat pernyataan akan memenuhi persyaratan higiene sanitasi 3. Surat pernyataan memenuhi standar usaha pembibitan dan budi daya burung walet 4. Dokumen layout/desain		daya ternak yang baik 2. Memenuhi komitmen penerapan Higiene sanitasi 3. Menyampaikan laporan realisasi pengembangan pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Veteriner - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangun proses produksi 5. Prosedur tertulis penerapan higiene sanitasi					
			Usaha pencucian sarang burung walet	- Mikro - Keci - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesesuaian manajemen usaha 2. Surat pernyataan akan memenuhi persyaratan	7 Hari	1. Memenuhi komitmen penerapan higiene sanitasi 2. Memenuhi kewajiban standar usaha pembersihan dan pencucian	- Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.584

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							higiene sanitasi 3. Dokumen layout/desain bangun proses produksi 4. Prosedur tertulis penerapan		sarang burung walet 3. Menyampaikan laporan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							higiene sanitasi		4. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.586

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Usaha pengolahan sarang burung walet	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesesuaian manajemen usaha 2. Surat pernyataan akan memenuhi	7 Hari	1. Memenuhi komitmen penerapan higiene sanitasi 2. Memenuhi kewajiban standar usaha pengolahan	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.587

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							persyaratan higiene sanitasi 3. Dokumen layout/desain bangun proses produksi 4. Prosedur tertulis penerapan		sarang burung walet 3. Menyampaikan laporan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							higiene sanitasi		4. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
72	01499	Pembibitan dan Budi daya Aneka Ternak Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan	- Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.589

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik - Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.590

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan/Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja		Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
73	01621	Jasa Pelayan-an Kese-hatan Ternak	Seluruh	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									veteriner dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha 3. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki tempat jasa pelayanan kesehatan ternak 2. Surat pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan	7 Hari	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner yang dari Dinas yang membidangi fungsi		Seluruh/ PMDN	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							instalasi farmasi, yang dipersyarat-kan untuk jasa pelayanan kesehatan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner 3. Surat pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki		Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nomor pendaftaran		perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha 3. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
74	01622	Jasa Perka-winan Ternak	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	-	Otomatis	1. Memenuhi dan memelihara perlengkapan dan peralatan yang dipersyaratkan minimal Kontainer, N2 cair, semen beku, sarung tangan atau *plastic gloves*, gun IB dan *plastic sheath*. 2. Memiliki surat keterangan	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemenuhan persyaratan teknis sesuai angka 1 di atas dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan.			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.599

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode bull yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah, selama menjalankan kegiatan usaha. 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki tempat jasa perkawinan ternak atau unit pelayanan kesehatan hewan 2. Surat pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti perlengkapan dan peralatan yang	7 Hari	1. Memenuhi dan memelihara perlengkapan dan peralatan yang dipersyaratkan minimal Kontainer, N2 cair, semen beku, sarung tangan atau *plastic gloves*, gun IB dan *plastic sheath*. 2. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai angka 1 di atas		Seluruh/ PMDN	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.601

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dipersyaratkan minimal Kontainer, N2 cair, semen beku, sarung tangan atau *plastic gloves*, gun IB, dan *plastic sheath* 3. Surat pernyataan menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode bull yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah		dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. 3. Menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode bull yang sama paling lama 3			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.602

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah, selama menjalankan kegiatan usaha. 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya .			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.603

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
75	01623	Jasa Penetas-an Telur	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan produksi dan distribusi ternak umur sehari 2. Menyampai-kan laporan pengelolaan telur infertil 3. Menyampai-kan laporan kegiatan pengembangan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Penilaian Penerap-an Cara Penetas-an Telur Yang Baik	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.604

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, strain dan lokasi usaha peternakan 2. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara penetasan telur yang baik	7 Hari	1. Menerapkan standar cara penetasan yang baik 2. Menyampaikan Setting Hatching Record (SHR) 3. Menyampaikan laporan. produksi dan distribusi ternak umur sehari 4. Menyampaikan laporan pengelolaan telur infertil 5. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 6. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
76	01629	Jasa Penun-jang Peternak-an Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan *self declare* terhadap standar kegiatan usaha jasa	-	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.606

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peternakan lainnya 2. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan	7 Hari	1. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pemba-ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.607

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya 2. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
77	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Penge-pakan Daging Bukan Unggas	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan terkait dengan	15 Hari	1. Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH sebelum operasional berupa pernyataan memiliki tenaga:	- Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.608

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan 2. Surat pernyataan akan memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan		a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner b. tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dibawah pengawasan dokter	- Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.609

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan akan mempekerjakan: a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner b. Tenaga pemeriksa daging		hewan penanggung jawab teknis c. *Animal Welfare Officer* (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis dan d. Paling kurang 2 orang Juru			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.610

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(keurmaster) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis c. Animal Welfare Officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis d. Paling kurang dua		Sembelih Halal. 2. Pemenuhan komitmen memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan, sebelum RPH operasional 3. Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersya-ratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-dangan		4. Memiliki rekomendasi sistem pengelolaan limbah.			
78	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Penge-pakan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi fungsi	15 Hari	1. Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH sebelum operasional berupa	- Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.612

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Daging Unggas					peternakan dan kesehatan hewan terkait dengan persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan 2. Surat pernyataan akan memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi,		pernyataan memiliki tenaga: Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner a. tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dibawah pengawasan dokter hewan	- Registrasi Produk Hewan - Surat Pendaftaran Berbahaya	wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							biosekuriti dan kesejahteraan hewan 3. Surat pernyataan akan mempekerja-kan: a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penang-gung jawab teknis pengawas-an kesehatan masyara-		penang-gung jawab teknis b. *Animal Welfare Officer* (AWO) dibawah penga-wasan dokter hewan penang-gung jawab teknis dan c. Paling kurang 2 orang Juru Sembelih Halal.			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.614

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kat veteriner b. Tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis c. Animal Welfare Officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan		2. Pemenuhan komitmen memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan, sebelum RPH operasional 3. Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab teknis d. Paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersya-ratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-dangan		4. Memiliki rekomendasi sistem pengelolaan limbah.			
79	21024	Industri Bahan	Produsen Obat	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan	20 Hari	1. Menyampai-kan laporan	- Pendaf-taran	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	Tradisional untuk Hewan	- Menengah - Besar			memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai lokasi untuk produksi obat hewan sarana/ peralatan dan		rencana impor bahan baku, rencana produksi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB). 3. Menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan	Obat Hewan (pendaftaran baru) - Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran ulang) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Perubahan Nomor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen layout/ rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan 4. Dokumen prosedur pelaksanaan		apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	Pendaftaran Obat Hewan) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan) - Sertifikat Cara Pembuatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan produksi 5. Dokumen struktur organisasi 6. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen			Obat Hewan yang Baik (CPO-HB)		
80	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan	20 Hari	1. Menyampaikan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi	- Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran baru) - Pendaftaran	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.619

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan		sesuai dengan kewenangannya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	Obat Hewan (pendaftaran ulang) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan) - Pendaftaran Obat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersihan b. *Pest control* c. Area karantina, penolakan (*rejected*) dan			Hewan (Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.621

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelulusan (released) d. Area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. Ventilasi dan penerang-an yang memadai f. Tempat penyim-panan yang memadai sesuai dengan kriteria penyim-panan obat			- Sertifi-kat Cara Distri-busi Obat Ikan Yang Baik - Sertifi-kat Pendaf-taran Obat Ikan		

I.B.622

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. Ruang penyim-panan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. Pallet/rak untuk penyimpan an obat hewan i. Alat pemadam kebakaran j. Alat pemantau suhu yang dikalibrasi k. Alat pelindung diri sesuai kebutuhan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.623

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. Kebersihan ruangan b. Pengadaan /pembeli-an obat hewan c. Pengarsip-an dokumen d. Penerima-an obat hewan e. Penyim-panan obat hewan f. pengeluar-an obat hewan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.624

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. Penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa h. Sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. Pemantauan suhu j. Pemilihan jasa *pest control* k. Pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)*					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.625

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							l. Pengembalian obat hewan kepada pemasok m. Pemusnahan obat hewan n. Pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
81	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat	20 Hari	1. Menyampaikan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampaikan laporan permohonan	- Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran baru) - Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran ulang) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Peru-	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan		persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	bahan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Penga-lihan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Pene-tapan Pusat		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.628

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana 7. Kebersihan 8. *Pest control* 9. Area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (released) 10. Area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci			Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Ventilasi dan penerangan yang memadai 12. Tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat 13. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain 14. Pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan 15. Alat pemadam kebakaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							16. Alat pemantau suhu yang dikalibrasi dan 17. Alat pelindung diri sesuai kebutuhan 18. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur 19. kebersihan ruangan 20. Pengadaan/pembelian obat hewan 21. Pengarsipan dokumen 22. Penerimaan obat hewan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.631

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							23. Penyimpanan obat hewan 24. Pengeluaran obat hewan 25. Penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa 26. Sistem k3 (kesehatan dan keselamatan kerja) 27. Pemantauan suhu 28. Pemilihan jasa *pest control* 29. Pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							30. Pengembalian obat hewan kepada pemasok 31. Pemusnahan obat hewan 32. Pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/ bandara ke customer tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir					
82	46446	Perdagangan	Seluruh (eksportir,	- Mikro	Menengah Tinggi		1. Surat pernyataan	20 Hari	1. Menyampaikan laporan		Seluruh (Eksportir/	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.633

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Besar Kosmetik untuk Hewan	importir, distributor)	- Kecil - Menengah - Besar		NIB dan Sertifikat Standar	memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin		ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan	- Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran baru) - Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran ulang) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Peru-	Importir / Distributor)	
											Distributor PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana:		apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	bahan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Penga-lihan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Penet-apan Pusat		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.635

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Kebersihan b. *pest control* c. area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (*released*) d. area penolakan (*rejected*) yang berada di lokasi yang terkunci			Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.636

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. ventilasi dan pene-rangan yang memadai f. tempat penyim-panan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpa nan oba g. ruang penyimpa nan obat hewan terpisah dengan komoditi lain					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.637

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							h. pallet/ rak untuk penyim-panan obat hewan i. alat pemadam kebaka-ran j. alat peman-tau suhu yang dikalib-rasi k. alat pelin-dung diri sesuai kebu-tuhan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.638

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. obat hewan pengeluaran obat hewan g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.640

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pest control k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)* l. pengembalian obat hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan n. pengiriman obat dari produ-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sen, pelabu-han/ bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyim-panan perusa-haan importir					
83	46447	Per-dagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan	20 Hari	1. Menyampai-kan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	- Pendaf-taran Obat Hewan (pen-daftar-an baru)	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.642

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program		instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampai-kan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	- Pendaf-taran Obat Hewan (pen-daftar-an ulang) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Peru-bahan Nomor Pendaf-taran Obat Hewan)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersihan b. pest control c. area karantina, penolakan			- Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan) - Rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*rejected*) dan pelulusan (released) d. area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan penerangan yang memadai f. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria pe-			yang kontrak Produksi Suplemen Kesehatan - Perubahan Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik - Rekomendasi Impor-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nyimpanan obat g. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/ rak untuk penyimpanan obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat pemantau suhu yang dikalibrasi k. alat pelindung diri			tir Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan - Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.646

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai kebutuhan 7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. Kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan			dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.647

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.648

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)* l. pengembalian obat hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan n. pengiriman obat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari produsen, pelabuhan/ bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir			-		
84	46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisi-	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang	20 Hari	1. Menyampaikan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik	- Pendaftaran Obat Hewan (pen-	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.650

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		onal Untuk Manusia dan Hewan					dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampai-kan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha	daftar-an baru) - Pendaf-taran Obat Hewan (pen-daftar-an ulang) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Peru-bahan Nomor Pen-daftar-		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.651

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersihan b. *pest control* c. area karantina,		yang telah terbit.	an Obat Hewan) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.652

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penolakan (*rejected*) dan pelulusan (released) d. area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan penerangan yang memadai f. tempat penyimpanan yang memadai			dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.653

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan kriteria penyimpanan oba g. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/ rak untuk penyim-panan obat hewan i. alat pemadam kebaka-ran					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.654

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							j. alat pemantau suhu yang dikalibrasi k. alat pelindung diri sesuai kebutuhan 7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.655

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.656

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan 656embali obat hewan *(recall)* l. pengembalian obat					

SK No 136692 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan n. pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/ bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyimpanan perusa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							haan importir					
85	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/	20 Hari	1. Menyampaikan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar	- Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran baru) - Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran ulang) - Pendaftaran Obat	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya		yang telah ditetapkan. 3. Menyampai-kan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	Hewan (Perse-tujuan Peru-bahan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Penga-lihan Nomor Pen-daftar-		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.660

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersih-an b. *pest control* c. area karantina, penolak-an (*rejected*) dan pelulusan (released) d. area penolak-			an Obat Hewan) - Penet-apan Pusat Penye-dia Bahan Baku dan/ atau Bahan Peno-long		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan pene-rangan yang memadai f. tempat penyim-panan yang memadai sesuai dengan kriteria penyim-panan obat					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.662

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/ rak untuk penyimpanan obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat pemantau suhu yang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.663

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dikalib-rasi k. alat pelin-dung diri sesuai kebu-tuhan 7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengada-an/pem-belian obat hewan c. pengar-sipan dokumen					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.664

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.665

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							j. pemilih-an jasa *pest control* k. pengem-balian dan penarik-an kembali obat hewan *(recall)* l. pengem-balian obat hewan kepada pemasok m. pemusnah-an obat hewan n. pengirim-an obat dari produsen, pelabu-han/ bandara ke					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							customer tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir					
86	47726	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan	- Mikro, - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat	20 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi		dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampai-kan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.668

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersih-an b. *pest control* c. area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (*released*)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.669

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. area penolakan (*rejected*) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan pene-rangan yang memadai f. tempat penyim-panan yang memadai sesuai dengan kriteria penyim-panan oba g. ruang penyim-					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.670

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/ rak untuk penyim-panan obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat peman-tau suhu yang dikalibrasi k. alat pelin-dung diri sesuai kebu-tuhan					

SK No 136678 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.671

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.672

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)*					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.673

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							l. pengembalian obat hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan n. pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/ bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
87	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 4. Surat pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH,			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.676

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan sertifikat pelatihan PJTOH. 5. Surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. 6. Dokumen struktur organisasi. 7. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya. 8. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. 9. Dokumentasi sarana: a. kebersihan b. pest *control* c. area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (*released*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan penerang-an yang memadai f. tempat penyimpan an yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpan an obat g. ruang penyimpan an obat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat pemantau suhu yang dikalibrasi dan k. alat pelindung diri sesuai kebutuhan 10. Dokumen standar			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.680

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.681

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									g. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (*recall*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									l. pengembalian obat hewan kepada pemasok dan m. pemusnahan obat hewan			
88	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menyampaikan laporan dan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 4. Surat pernyataan memiliki Penanggung			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.684

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH. 5. Surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu.	-		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.685

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Dokumen struktur organisasi. 7. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya. 8. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. 9. Dokumentasi sarana: a. kebersihan b. pest *control*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (*released*) d. area penolakan (*rejected*) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan penerangan yang memadai f. tempat penyim-panan yang memadai			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.687

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan kriteria penyim-panan obat g. ruang penyimp-anan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/rak untuk penyimpan an obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat pemantau suhu yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikalibrasi dan k. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. 10. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.689

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan g. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)			

SK No 136659 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.690

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (*recall*) l. pengembalian obat hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan	-		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.691

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
89	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat	20 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.692

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen Standar Operasional prosedur (SOP)		terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 4. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH). 5. Memiliki sarana prasarana usaha.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki prosedur dalam menjalankan kegiatan usaha.			
90	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Seluruh	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri, Puskeswan Mandiri, atau Klinik Hewan sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan	Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Praktik Dokter Hewan Mandiri Kuda, Praktik Dokter Hewan Mandiri Akuatik, atau Praktik Dokter Hewan Mandiri Satwa Liar sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									veteriner dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota, atau Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 3. Memenuhi standar pengelolaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 4. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.698

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokter hewan penanggungja wab untuk Klinik Hewan 6. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 7. Menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi apabila menggunakan makanan hewan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.699

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kesayangan komersial dalam menjalankan kegiatan usaha shelter hewan 8. Menerapkan sistem pengelolaan limbah untuk (Klinik Hewan), selama menjalankan kegiatan usaha 9. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.700

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki tempat Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner 2. Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi, yang dipersyarat-kan untuk	7 Hari	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner atau laboratorium veteriner dari		Seluruh	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.701

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner 3. Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan,		Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, bahan,			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.702

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan bahan yang dipersyarat-kan untuk Laboratorium Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laboratorium Veteriner 4. Surat Pernyataan memiliki Dokter Hewan penanggung jawab Klinik		dan/atau instalasi farmasi yang dipersyarat-kan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner atau Laboratorium Veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha. 3. Memiliki dokter hewan penanggung-jawab			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.703

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Hewan, Rumah Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner yang dibuktikan dengan ijazah Dokter Hewan 5. Surat pernyataan memiliki radiologi atau x-ray yang mempunyai perizinan pemakaian dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN),		4. Memenuhi standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 5. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 6. Menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.704

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk kegiatan usaha Rumah Sakit Hewan 6. Surat Pernyataan pemenuhan standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 7. Surat pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran		apabila menggunakan makanan hewan kesayangan komersial dalam menjalankan kegiatan usaha shelter hewan 7. Menerapkan sistem pengelolaan limbah, selama menjalankan kegiatan usaha. 8. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Surat pernyataan Memiliki instalasi pembuangan limbah atau bekerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah		pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki tempat Rumah Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner	7 Hari	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Rumah Sakit Hewan atau		Seluruh/ PMDN	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.706

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi, yang dipersyaratkan untuk Rumah Sakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner 3. Surat Pernyataan memiliki		Laboratorium Veteriner sesuai yang dipersyarat-kan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner atau laboratorium veteriner dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.707

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan bahan yang dipersyaratkan untuk Laboratorium veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laboratorium Veteriner 4. Surat Pernyataan memiliki Dokter Hewan penanggung jawab Rumah		Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkap-an, peralatan, bahan, dan/atau instalasi farmasi yang dipersyarat-kan dalam ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner yang dibuktikan dengan ijazah Dokter Hewan 5. Surat pernyataan memiliki radiologi atau x ray yang mempunyai perizinan pemakaian dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN), untuk kegiatan usaha Rumah Sakit Hewan: 6. Surat Pernyataan		peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner atau Laboratorium Veteriner selama menjalankan kegiatan usaha 3. Memiliki dokter hewan penanggungj awab 4. Memenuhi standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemenuhan standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 7. Surat Pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran 8. Surat pernyataan memiliki instalasi pembuangan limbah atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam		usaha shelter hewan 5. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 6. Menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi apabila menggunakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan limbah		makanan hewan kesayangan komersial dalam menjalankan kegiatan usaha shelter hewan 7. Menerapkan sistem pengelolaan limbah, selama menjalankan kegiatan usaha 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.711

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan kewenangan-nya			
91	01116	Pertanian Kacang Hortikultura	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Menerapkan peraturan perbenihan 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Pendaftaran varietas tanaman hortikultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.712

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah					1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.713

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana	7 Hari			Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.714

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.715

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultu-ra, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang								Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.716

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong,	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi	7 Hari	1. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.717

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya				2. Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Pernyataan		kewenangan-nya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 5. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi		komoditas dan lokasi)		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
92	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada	Pendaftaran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.719

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hortikultura sayuran daun						pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *corporate social responsibili-ty* (CSR) secara		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.721

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan juga pemanenan, dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.722

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang								Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.723

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya	- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 2. Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu 3. Surat Pernyataan	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.724

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan		Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.725

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang perbenihan 5. Surat Keterangan menguasai tempat usaha produksi				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.726

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
93	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaftaran varietas tanaman hortikultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi		1. Surat Pernyataan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan		Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

SK No 136622 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.727

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan		usaha dan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pascapanen jika	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya								Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.731

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai Lahan/kebun untuk usaha budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW) 2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai	7 Hari	1. Melakukan transfer teknologi 2. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.732

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen. perizinan sarana prasarana jika diperlukan) 3. Rencana usaha 4. Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 5. Surat pernyataan		4. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.733

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
94	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaftaran varietas tanaman hortikultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat keterangan menguasai	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat usaha produksi 2. Surat keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat keterangan kompetensi		*corporate* social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/ oyong dan sejenisnya								lintas Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)			
95	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	Pendaftaran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hortikultura sayuran umbi						instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.741

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis,	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya				tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi		secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
96	01136	Pertanian Jamur	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman jamur	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.745

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana	7 Hari			Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca-	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya								Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Melakukan budi daya yang		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.748

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.749

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
97	01139	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.750

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi		*corporate social responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.752

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya								lintas Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan dan 3. Surat Pernyataan memiliki atau	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)			
98	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Pertanian tanaman bunga, yang	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha.	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.754

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Produksi-nya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman Bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir,						2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gerbera/ hebras, Gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga Lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tanaman bunga Hidup masuk ke golongan 013.						yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.757

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya.		2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.					
99	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaftaran varietas tanaman hortikultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.759

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		2. Menerapkan peraturan Perbenihan			
100	01210	Pertanian Buah Anggur	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	Pendaf-taran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.761

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			buah anggur						instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

SK No 136587 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.762

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.763

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan penyiapan atau pelaksana-an, penanam-an, pemelihara-an, pemanenan dan pasca-panen buah anggur	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha. 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.764

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Melakukan Budi daya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

SK No 136584 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya.		2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya . 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.					
101	01230	Pertanian Buah Jeruk	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah jeruk	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.768

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 136580 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.769

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		2. Menerapkan peraturan Perbenihan			
			Kegiatan penyiapan/ pelaksana-an,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.770

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanaman, pemeliharaan , pemanenan dan pasca-panen buah jeruk Besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin						2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 3. Membuat catatan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan clementine, dan buah jeruk lainnya						kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.772

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP. 2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 4. Membuat prosedur kerja dalam		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 136576 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.		memenuhi standar K3L.			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.774

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
102	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah apel dan buah batu	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.775

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi		corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 136573 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan penyiapan/ pelaksana-an, penanam-an, pemelihara-an, pemanenan dan pasca-panen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha. 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa, kepel, terong Belanda dan buah delima, dan buah batu lainnya								lintas Provinsi	
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.778

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 136570 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.779

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP. 2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 136569 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.780

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.		4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
103	01251	Pertanian Buah Beri	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah beri	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Surat Pernyataan menguasai	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi		corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan penyiapan/ pelaksana-an, penanam-an, pemelihara-an, pemanenan dan pasca-panen buah beri seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha. 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			strawberry dan beri lainnya								lintas Provinsi	
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.786

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP. 2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.787

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.		4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.788

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
104	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman sayuran tahunan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.789

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 136559 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.790

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya								Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)			
105	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	Pendaf-taran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			buah semak lainnya						instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.795

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha. 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.798

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya.		2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.					
106	01283	Pertanian Cabai	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman cabai	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.800

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.801

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		2. Menerapkan peraturan Perbenihan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen sayuran cabai (capsicumspp), seperti cabai Besar, cabai rawit dan paprika	- Menengah					melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		kewenangan-nya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.804

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
107	01301	Pertanian Tanaman Hias	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.805

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan) 3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya		2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah					
108	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaftaran varietas tanaman hortikultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.809

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.810

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		2. Menerapkan peraturan Perbenihan		lintas Provinsi	